

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SALAH TANGKAP OLEH APARAT PENEGAK HUKUM

ABSTRAK

Peristiwa salah tangkap merupakan kesalahan yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Kesalahan ini mencerminkan kekeliruan dalam mengidentifikasi individu yang sebenarnya bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Dalam kasus salah tangkap terhadap anak dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga prosedur hukum yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tangkap terdapat pada Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP yang mengatur mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Kemudian, terdapat dampak yang dialami oleh anak sebagai korban dan dampak terhadap aparat penegak hukum. Dampak terhadap penyidik sebagai aparat penegak hukum dapat berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333, Pasal 335, dan Pasal 335 KUHP. Selain itu, terdapat sanksi kode etik bagi aparat penegak hukum yang melanggar prosedur peradilan pidana anak yang telah diatur dalam peraturan instansi terkait. Dalam hal ini, dalam regulasi yang mengatur mengenai anak perlu diperkuat yang secara tegas mengatur tentang pelanggaran dalam kasus salah tangkap terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Salah tangkap, anak, aparat penegak hukum

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS A VICTIMS OF WRONGFUL ARREST BY CRIMINAL JUSTICE AUTHORITIES

ABSTRACT

Wrongful arrest is a legal error related to the determination of a suspect. This mistake reflects a failure to correctly identify the individual who is truly responsible for a criminal act. In cases where a child is wrongfully arrested, such actions may constitute violations of fundamental human rights, including physical abuse, psychological pressure, and legal procedures that do not comply with statutory regulations. The research method applied is normative-juridical, using statutory and case approaches. Data were obtained through literature review, including legislation, court decisions, scholarly literature, and official reports. The findings indicate that legal protection for children as victims of wrongful arrest is provided under Articles 95 and 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), which regulate compensation and rehabilitation. Furthermore, there are adverse impacts experienced by the child victim as well as implications for law enforcement officials. Investigators who engage in wrongful arrests may be subject to criminal sanctions under Articles 333, 335, and 351 of the Indonesian Penal Code (KUHP). In addition, ethical sanctions may also be imposed on law enforcement officers who violate juvenile criminal justice procedures, as stipulated in the internal regulations of the relevant institutions. In this regard, existing regulations on child protection should be reinforced with explicit provisions concerning wrongful arrest cases involving minors.

Keyword : *Legal protection, Wrongful arrest, Child, Criminal justice authorities*